

BAB IV

KEPENTINGAN NASIONAL DAN UPAYA AMERIKA SERIKAT

Amerika Serikat merasa terancam kepentingan nasionalnya di Timur Tengah ketika Irak melancarkan invasi militernya terhadap Kuwait. Oleh karena itu Amerika Serikat mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya baik militer maupun ekonomi untuk mengusir Irak dari Kuwait dan memulihkan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah. Bab ini akan menjelaskan tentang kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah dengan memberikan latar belakang sejarahnya. Dalam hal ini akan terlihat bahwa invasi Irak terhadap Kuwait akan berbenturan dengan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Oleh karena itulah Bab ini akan menjelaskan bagaimana Amerika Serikat melakukan upaya untuk menyelesaikan invasi Irak dalam rangka mengamankan kepentingan nasionalnya. Upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat mencakup upaya diplomasi dan tindakan militer terhadap Irak.

A. Kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah

Pertimbangan strategik kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah sejak tahun 1960an tidak banyak berubah, yaitu berdasarkan tiga pilar utama, yaitu minyak, Israel dan stabilitas kawasan. Kepentingan Amerika Serikat secara langsung, keterlibatan dan intervensi di kawasan Timur Tengah merupakan fenomena yang relatif baru. Walaupun Timur Tengah merupakan kawasan yang penting bagi perekonomian dan perdagangan dunia dalam beberapa abad yang lalu, namun interaksi Amerika Serikat di kawasan itu belum terlihat dan berkembang secara signifikan, karena pada saat itu Inggris, Perancis dan Turki yang silih berganti melakukan kolonisasi dan kontrol terhadap kawasan Timur Tengah.⁹⁷

Pada akhir abad ke-19 kawasan Timur Tengah yang terbentang dari Mesir hingga pantai Mediteranian di Palestina dan Siria dan ke Timur hingga Mesopotamia (Irak) dan hingga perbatasan dengan Iran, dan ke Selatan melalui jazirah Arab hingga Yaman masih dibawah kekuasaan Kesultanan Ottoman dari Turki selama 400 tahun. Ketika Perang Dunia Pertama pecah, Amerika Serikat berperang bersama-sama Inggris,

⁹⁷ Phyllis Bennis, *Before and After-US Foreign Policy and The War on Terrorism*, Olive Branch Press, New York, 2003, hal. 21-22

Perancis dan Kekaisaran Rusia melawan Jerman, Kesultanan Ottoman dan Kekaisaran Austro-Hongaria. Pada saat itu Amerika Serikat baru menjadi negara yang muncul dalam percaturan internasional. Bahkan sebelum perang usai, Inggris dan Perancis telah membagi wilayah-wilayah Arab dan dilanjutkan hingga perang selesai. Ketika itu Amerika Serikat hanya menjadi penonton saja, belum mengambil peran penguasaan kawasan Timur Tengah.

Setelah Perang Dunia Pertama selesai, Kesultanan Ottoman dapat dikalahkan, maka kelompok sekuler Turki dibawah pimpinan Mustafa Kemal mendirikan Republik Turki. Berdasarkan Perjanjian Sykes-Picot, Inggris menguasai Mesir dan mengambilalih Trans-Yordan, Paletina dan Irak, sementara Perancis menguasai Siria dan Libanon. Jazirah Arab tetap menjadi protektorat Inggris. Demikian juga Inggris tetap menguasai Kuwait untuk menjamin kepentingan Inggris atas minyak dan pelabuhan lautnya. Persia tetap dalam penguasaan Inggris dan pada tahun 1921 Reza Khan menjatuhkan Dinasti Qajar dan empat tahun kemudian dia mengangkat dirinya sebagai Shah dan Persia menjadi Iran dibawah Dinasti Shah Pahlevi.⁹⁸

Dalam menghadapi dominasi dan kolonialisasi kawasan Timur Tengah oleh Inggris dan Perancis, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson pada saat itu mengeluarkan empat butir pernyataan yang menekankan kepada penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa Arab di kawasan Timur Tengah. Bangsa Eropa yang dapat memenangkan Perang Dunia Pertama mencoba untuk mengetahui apakah rakyat di kawasan Timur Tengah ingin hidup dibawah kekuasaan Ottoman atau tetap dibawah kekuasaan bangsa Eropa. Untuk itu Inggris dan Perancis membentuk Komisi Inter-Aliansi yang akan melakukan survei untuk keperluan penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa Arab. Berkaitan dengan hal tersebut Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mulai melakukan kampanye untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Dengan keterlibatan Amerika Serikat dalam memenangkan perang, maka Amerika Serikat mempunyai posisi yang baik untuk mulai berkompetisi melawan kekuatan bangsa Eropa dengan meminta untuk lebih dilibatkan dalam strategi dan perekonomian internasional. Pendekatan Presiden Wilson dalam hubungan internasional terpaku pada pengertian klasik bahwa kolonialisme sudah tidak ada lagi di masa depan. Oleh karena itu kebijakan Amerika Serikat berubah dari mencari pengaruh yang tidak langsung dan tidak resmi menjadi kebijakan yang memenangkan dan

⁹⁸ Ibid, hal. 23

memelihara kekuasaannya atas negara-negara merdeka, rakyat yang patuh dan akses terhadap sumberdaya di negara-negara bekas jajahannya.⁹⁹

Inggris dan Perancis menguasai ladang-ladang minyak di kawasan Timur Tengah sejak tahun 1920an ketika mulai ditemukannya ladang minyak. Sementara Uni Soviet melakukan hubungan dengan negara Iran yang kaya akan minyak. Pada saat itu perusahaan minyak Inggris dan Perancis menjadi pemain utama dalam penguasaan minyak di Timur Tengah dan Amerika Serikat hanya menguasai sepuluh persennya saja. Pada tahun 1930 ditemukan ladang minyak di Arab Saudi dan penemuan ini menimbulkan konflik antara perusahaan minyak Amerika Serikat dan Inggris. Namun Amerika Serikat dapat menguasai ladang minyak di Arab Saudi, karena Inggris memiliki hutang kepada Amerika Serikat untuk membiaya peperangannya melawan Jerman ketika Perang Dunia Pertama, sehingga posisi Amerika Serikat menjadi lebih kuat. Pada tahun 1933 Kerajaan Arab Saudi memberikan konsesi eksklusif kepada *Arabian-American Oil Company (Aramco)* yang merupakan konsorsium perusahaan minyak raksasa Amerika Serikat yaitu Esso, Texaco, Mobil dan Socal. Konsesi minyak itu menandakan dimulainya kemunculan dominasi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dan merupakan anak peluru yang akan dikonsolidasikan pada Perang Dunia Kedua. Bagi Amerika Serikat Jazirah Arab dan Teluk Persia khususnya Saudi Arabia merupakan sumber kekayaan raksasa bagi kekuatan strategis dan salah satu material yang terbesar dalam sejarah dunia.¹⁰⁰

Perang Dunia Kedua telah merubah posisi dan kekuatan Amerika Serikat di dunia internasional. Amerika Serikat membayar mahal perang dengan darah para prajuritnya, namun terbebas dari korban sipil yang massal dan kerusakan fisik, ekonomi dan sosial akibat perang. Berbeda dengan Inggris dan Perancis, kedua negara itu mengalami kerusakan ekonomi, infrastruktur dan keruntuhan kolonialismenya dan bahkan mengurangi pengaruhnya di dunia internasional. Amerika Serikat terhindar dari kerusakan fisik dalam perang di daratan Eropa dan menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki kekuatan nuklir. Uni Soviet kehilangan 20 juta rakyatnya dalam Perang Dunia Kedua dan mengalami kehancuran infrastruktur, kota dan pinggiran-pinggiran kota yang memerlukan waktu lama untuk merekonstruksinya. Kondisi dan momen itulah yang membuat Amerika Serikat menjadi negara adidaya di dunia.¹⁰¹

⁹⁹ Ibid, hal.24

¹⁰⁰ Anthony Arnove, *Iraq Under Siege-The Deadly Impact of Sanctions and War*, Pluto Press, London, 2003, hal. 71

¹⁰¹ Bennis, opcit, hal.27

Setelah Perang Dunia Kedua, Presiden Harry Truman yang ketika menjadi Senator mendukung gerakan Zionisme berupaya melakukan kebijakan-kebijakan tentang Timur Tengah yang menguntungkan Amerika Serikat, terutama dalam memelihara akses bagi perusahaan minyaknya. Pada akhir Perang Dunia Kedua, perusahaan minyak Amerika Serikat menguasai 42 persen ladang minyak di Timur Tengah, terutama perusahaan minyak Socal, Esso dan Socony yang merupakan lima besar perusahaan minyak Amerika Serikat. Para petinggi perusahaan minyak itu menempatkan orang-orangnya pada posisi penting di Departemen Luar Negeri maupun Departemen Perahanan agar mereka dapat menjaga agar kepentingan Amerika Serikat dan penguasaan minyak di kawasan Timur Tengah tetap terjamin. Salah satu aspek dari bantuan proyek Marshal Plan untuk Eropa telah menciptakan pasar baru bagi produk minyak Amerika Serikat. Minyak telah menggantikan batubara sebagai bahan bakar industri di Eropa maupun Jepang dan penguasaan atas minyak yang sangat vital oleh Amerika Serikat telah menciptakan Amerika Serikat menjadi negara penjamin akses terhadap minyak bagi Eropa dan Jepang.¹⁰² Itulah sebabnya sejak saat itu penguasaan minyak dari Timur Tengah merupakan salah satu kepentingan nasional Amerika Serikat yang sangat vital di Timur Tengah.

Hingga tahun 1945 Amerika Serikat telah melakukan konsolidasi posisinya sebagai aktor utama di kawasan Timur Tengah. Namun masalah yang timbul pada saat itu adalah keinginan negara-negara Arab untuk merdeka dan banyaknya pengungsi Yahudi di Eropa yang menginginkan pergi ke tanah sucinya di Palestina. Sementara itu Amerika dan Inggris masih membatasi pengungsi Yahudi ke Palestina, karena Inggris sebagai pemegang mandat atas wilayah Palestina tidak menghendaki orang Yahudi menjadi lebih banyak daripada orang Islam dan Kristen yang sudah berada di Palestina. Desakan yang muncul agar korban bencana Nazi yang mengungsi dari negara-negara Jerman, Polandia, Perancis, Belanda dan banyak lagi kaum Yahudi yang mengisi kamp-kamp pengungsian di Eropa agar diberikan peluang untuk mengungsi ke Palestina atau negara lain membuat Amerika Serikat bergerak cepat untuk memainkan peranan yang lebih besar di kawasan Timur Tengah. Presiden Truman secara diplomatik dan hati-hati namun berkeinginan kuat untuk menggantikan posisi Inggris sebagai aktor utama regional Timur Tengah. Amerika Serikat melihat bahwa pembentukan negara Yahudi Eropa di Palestina merupakan sebuah langkah menuju aliansi yang potensial namun krusial. Amerika Serikat yakin bahwa negara-negara Arab akan menerima gagasan

¹⁰² Ibid, hal.28

tersebut dengan cara *fait accompli*.¹⁰³ Sementara di dalam negeri Amerika Serikat, Gerakan Yahudi (*Zionist Movement*) yang mewakili mayoritas warga Yahudi di Amerika Serikat menggunakan momentum tersebut dengan melakukan kampanye nasional di seluruh Amerika Serikat yang mendukung pengungsian besar-besaran orang Yahudi dari Eropa ke Palestina.

Kampanye warga Yahudi berhasil meyakinkan Pemerintah Amerika Serikat untuk membantu pengungsi Yahudi di Eropa. Amerika Serikat mengirim 130 Juta US Dollar ke Palestina untuk membantu transportasi pengungsi Yahudi. Presiden Truman bersama-sama pembuat kebijakan lainnya di Amerika Serikat percaya bahwa bangsa Yahudi dari Eropa yang akan mendiami Negara Israel akan menjadi sekutu yang dapat dipercaya. Amerika Serikat mulai menekan Inggris untuk mencabut semua larangan pengungsian Yahudi ke Palestina. Pada tahun 1945 Presiden Truman menulis surat kepada Perdana Menteri Inggris Clement Atlee untuk mendukung pemberian ijin masuk 100.000 pengungsi Yahudi ke Palestina. Perdana Menteri Atlee mengingatkan Presiden Truman bahwa Amerika Serikat telah berjanji kepada negara-negara Arab akan berkonsultasi dalam masalah tersebut. Dia mengatakan bahwa imigrasi massal akan menimbulkan ketakutan dan menjadi pemicu konflik di Kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Sementara itu Inggris mulai kehilangan kemampuannya untuk menegakan hukum dan tata tertib di Palestina dan para pemimpin Palestina meminta kedaulatan sendiri (*self-determination*).¹⁰⁴ Akhirnya Amerika Serikat dan Inggris membentuk Komite Penyelidikan Gabungan (*Joint Committee of Inquiry*) untuk berangkat ke Palestina dan mempelajari masalah imigrasi. Pada Maret 1946 Komite memberikan rekomendasi bahwa Komite mendukung imigrasi 100.000 orang Yahudi ke Palestina, namun menolak usulan pembentukan negara Yahudi dan orang Yahudi tidak mempunyai hak otomatis pergi ke Palestina. Inggris berusaha untuk memberikan tawaran dengan memberikan ijin masuk bagi 100.000 orang Yahudi ke Palestina jika milisia Yahudi melepaskan senjatanya. Namun tiga bulan kemudian kaum Yahudi menjawab dengan meledakan delapan jalan raya dan jembatan kereta api di Palestina. Pada bulan Juli 1946 ekstrimis Yahudi meledakan Kantor Pemerintahan Inggris di Hotel King David di Jerusalem yang

¹⁰³ Ibid, hal.30

¹⁰⁴ Beverly Milton-Edwards, Peter Hinchcliffe, *Conflicts in The Middle East Since 1945*, 2nd Edition, Routledge, New York, 2004, hal.12

mengakibatkan 80 orang meninggal dunia. Selanjutnya bentrokan bersenjata antara tentara Inggris dan milisia Yahudi dan Palestina tidak dapat dihindarkan¹⁰⁵.

Amerika Serikat terus menekan Inggris. Pada tahun 1947 Inggris mengumumkan bahwa masalah Palestina ini menjadi masalah PBB yang baru dibentuk. Atas dorongan Inggris dan Amerika Serikat, PBB membentuk *United Nations Special Commission on Palestine* (UNSCOP) untuk memberikan rekomendasi kepada PBB dalam penyelesaian tentang Palestina. Atas dasar rekomendasi yang diberikan UNSCOP, PBB mengusulkan untuk membagi Palestina menjadi dua negara untuk Arab dan Yahudi. Rencananya 55 persen wilayah Palestina menjadi Negara Yahudi dan 45 persen menjadi Negara Arab Palestina. Amerika Serikat sangat mendukung pemisahan dua negara tersebut. Uni Soviet yang semula menentang Zionisme merubah posisinya menjadi pendukung, karena Uni Soviet berfikir bahwa pembagian menjadi dua negara itu akan memperlemah pengaruh Inggris di Timur Tengah. Dalam Sidang Umum PBB pada tahun 1947, atas desakan dan lobi-lobi Amerika Serikat lebih dari dua pertiga anggota PBB menyetujui pemisahan dua negara Palestina.¹⁰⁶

Setelah terjadi pemisahan dua negara, maka mulailah pertikaian antara Arab Palestina dengan Yahudi. Pada tanggal 15 Mei 1948 Israel memproklamkan kemerdekaannya dan Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mendukung dan menawarkan hubungan diplomatik penuh dengan Israel. Proklamasi kemerdekaan Israel itu mengakibatkan beberapa negara Arab seperti Mesir, Trans-Yordania, Siria dan lain-lain mengirimkan pasukannya untuk perang di Palestina dan perang terjadi beberapa hari setelah kemerdekaan Israel.¹⁰⁷ Namun pasukan Arab itu dapat dikalahkan oleh pasukan Israel yang lebih terlatih dan militan. Setelah perang selesai Israel dapat menguasai 78 persen wilayah Mandat Palestina, lebih dari rencana yang diberikan PBB yaitu 55 persen dan 750.000 orang Palestina diusir dari tanah mereka. Amerika Serikat meminta negara-negara Arab untuk menerima pengungsi Palestina untuk masuk ke negara mereka. Untuk itu Amerika Serikat mendorong PBB untuk membentuk *United Nation Refugee Works Agency* (UNRWA) untuk memberikan bantuan makanan, kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya bagi pengungsi Palestina.¹⁰⁸

Amerika Serikat selanjutnya meningkatkan dukungan ekonomi bagi Israel. Berkat dukungan Amerika Serikat, Israel menjadi negara yang diperhitungkan dan sekaligus

¹⁰⁵ Bennis, opcit, hal.31

¹⁰⁶ Ibid, hal.32

¹⁰⁷ Milton, opcit, hal. 12

¹⁰⁸ Bennis, opcit, hal.34

dimusuhi di Timur Tengah. Namun demikian Amerika Serikat belum mempersiapkan masalah Timur Tengah dipusatkan di Israel. Bagi Amerika Serikat, negara-negara Arab yang kaya minyak dan negara-negara Timur Tengah lainnya tetap menjadi prioritas Amerika Serikat selama masa Perang Dingin. Selama tahun 1960an Amerika Serikat memelihara aliansinya dengan negara-negara Arab yang telah merdeka dari kolonial Inggris maupun Perancis. Namun pada saat itu terjadi gerakan nasionalis rakyat yang menentang proteksi Amerika Serikat dan Perusahaan Minyak Barat lainnya di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat sangat khawatir akan situasi tersebut karena dari Perusahaan Minyaknya di Timur Tengah, Amerika Serikat mendapatkan keuntungan yang sangat besar setiap tahunnya. Apabila gerakan nasionalisme tidak dapat dihentikan, maka hal itu akan menjadi bencana besar bagi Amerika Serikat. Oleh karena itu Amerika Serikat pada tahun 1966 mulai mempersenjatai Israel dengan pesawat tempur dan peluru kendali yang canggih. Hal itu dilakukan dalam upaya Amerika Serikat memperkuat posisinya di kawasan Timur Tengah. Menjelaskan strategi Amerika Serikat di Timur Tengah, James Feron dalam *New York Time* (11 Juni 1966) mengatakan: *"Amerika Serikat pada akhirnya berkesimpulan bahwa Amerika Serikat harus bergantung kepada kekuatan lokal untuk menangkal kekuatan lain sebagai lini pertama dalam keterlibatan langsung Amerika Serikat. Untuk itu Israel yang paling cocok dengan Strategi Amerika Serikat itu."*¹⁰⁹

Pada tahun 1965 Israel menghadapi kesulitan ekonomi akibat dari meningkatnya masalah-masalah ekonomi, tingginya pengangguran dan meningkatnya pajak, berakhirnya pembayaran reparasi dari Jerman, berkurangnya penjualan obligasi pemerintah dan berkurangnya imigran baru. Disamping itu terjadinya eksodus warga Israel yang pergi keluar dari negaranya. Dalam situasi seperti itu, bantuan Amerika Serikat kepada Israel merupakan solusi *win-win solution* bagi kedua belah pihak, Israel dapat memperbaiki perekonomiannya dan Amerika Serikat dapat menjadikan Israel sebagai kekuatan lokal yang dapat diandalkan dalam menghadapi kekuatan nasionalis di Timur Tengah. Selanjutnya musuh bagi kepentingan Amerika Serikat menjadi musuh Israel juga. Ketika terjadi Perang Enam Hari pada tahun 1967, Amerika Serikat mendukung penuh Israel dengan mengirimkan kekuatan Angkatan Laut dan Marinirnya, sehingga Israel dapat memenangkan perang dan mampu menduduki Dataran Tinggi Golan di Siria, Gurun Sinai di Mesir, Jerusalem Timur Palestina, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Perang Enam Hari tersebut telah menunjukkan dan mengukuhkan bahwa Israel

¹⁰⁹ Ibid, hal.39

dapat dijadikan "Polisi Regional" bagi kepentingan Amerika Serikat. Hal itu sesuai dengan memo Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang menyatakan: "*Israel mungkin telah melakukan lebih bagi Amerika Serikat di Timur Tengah yang berkaitan dengan uang maupun upaya yang diinvestasikan daripada semua negara aliansi Amerika Serikat di seluruh dunia sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di Timur Jauh hampir tidak ada seorangpun yang membantu kita di Vietnam. Namun disini, Israel dapat memenangkan peperangan yang dikendalikan sendiri, melepaskan kita dari ketergantungan, dan telah mengabdikan bagi kepentingan kita dan juga mereka.*"¹¹⁰

Sebagai hadiah atas keberhasilan Israel dalam Perang Enam Hari itu, Amerika Serikat membanjiri Israel dengan berbagai senjata canggih termasuk pesawat jet tempur Phantom. Dalam waktu empat tahun setelah perang, Israel telah menerima 1.5 Milyar US Dollar dalam bentuk persenjataan yang sepuluh kali lipat dari pemberian total selama dua puluh tahun sebelumnya. Setelah tahun 1967 ketergantungan Amerika Serikat terhadap Israel di Timur Tengah meningkat sangat pesat, akibatnya hubungan dengan negara-negara Arab tidak lagi menjadi prioritas utama kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Itulah sebabnya keberadaan dan keamanan Israel juga merupakan salah satu kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah.

Pada awal tahun 1970an terjadi peningkatan signifikansi strategi Amerika Serikat di Timur Tengah setelah bayang-bayang kekalahan Amerika Serikat di Vietnam mulai nampak. Perusahaan Minyak dunia mulai khawatir akan upaya yang dilakukan oleh negara-negara anggota OPEC yang radikal untuk membatasi akses perusahaan minyak Barat khususnya Amerika Serikat terhadap ladang minyaknya. Beberapa negara telah menyatakan akan melakukan nasionalisasi perusahaan minyak asing dan menggunakan minyak sebagai senjata melawan Israel dan Amerika Serikat. Tekanan itu ditujukan terhadap pemerintah Amerika Serikat untuk mengurangi dukungan terhadap Israel untuk menghindari kenaikan harga minyak dunia. Pada tahun 1973 Presiden Anwar Sadat mengumumkan akan menyerang Israel untuk mendapatkan wilayahnya yang diduduki Israel pada tahun 1967.¹¹¹ Demikian juga Raja Faisal dari Arab Saudi menegaskan kepada Presiden Nixon dan juga kepada Menlu Henry Kissinger bahwa negaranya membutuhkan dukungan negara-negara Arab lainnya untuk mendukung kepentingan Amerika Serikat di OPEC, namun dukungan itu tidak akan diperoleh bila Amerika Serikat masih mendukung Israel yang menduduki tanah Arab. Perusahaan Minyak Amerika

¹¹⁰ Ibid, hal. 39

¹¹¹ Milton, opcit, hal.16

Serikat setuju atas pandangan Raja Faisal. Menlu Kessinger menyetujui perubahan itu, namun akan menghadapi tentangan dari koalisi besar di Kongres apabila secara tiba-tiba dilakukan tekanan terhadap Israel untuk mundur dari wilayah Arab yang diduduki.¹¹²

Untuk mengubah situasi politik Timur Tengah yang lebih menguntungkan bagi negara-negara Arab, maka Mesir dan Siria pada 6 Oktober 1973 melancarkan serangan terhadap wilayah Arab yang diduduki Israel. Tentara Mesir melintasi Terusan Suez dan menyerang Gurun Sinai dan tentara Siria menyerang Dataran Tinggi Golan. Pada Perang Oktober itu Israel mengalami korban yang cukup besar. Pada situasi itu Amerika Serikat mengirimkan pasukannya melalui udara untuk membantu Israel. Negara-negara Arab dibawah pimpinan Arab Saudi yang sebelumnya mendukung kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah melalui OPEC mengurangi 25 persen produksi minyaknya dan melakukan embargo pengiriman minyak ke Amerika Serikat. Sementara itu tentara Israel di Sinai telah dikelilingi tentara Mesir yang siap untuk menghancurkannya. Uni Soviet yang masih melakukan hubungan diplomatik dan mendukung Mesir memberikan peringatan kepada Presiden Nixon dan Menlu Henry Kessinger bahwa Uni Soviet akan mengambil tindakan untuk mencegah korban yang lebih banyak. Untuk mencegah konfrontasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang akan menjurus kepada perang Nuklir, maka pada 22 Oktober 1973 Amerika Serikat dan Uni Soviet mensponsori gencatan dan Amerika Serikat ditekan agar Israel mau menandatangani perjanjian gencatan senjata itu. Akibat dari Perang Oktober itu, Israel mengalami krisis ekonomi yang sangat besar dan Israel kembali meminta bantuan ekonomi kepada Amerika Serikat. Pada tahun 1973 Amerika Serikat memberikan bantuan 8 Milyar US Dollar kepada Israel untuk empat tahun kedepan. Peristiwa diatas menyebabkan perubahan strategi Amerika Serikat di Timur Tengah dan paling tidak untuk seperempat abad berikutnya, yaitu dukungan terhadap Israel harus sesuai dengan perlindungan kepentingan Amerika Serikat terhadap akses minyaknya di Timur Tengah.¹¹³

Kawasan Timur Tengah yang aman dan damai merupakan kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah, karena Amerika Serikat memerlukan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan strateginya di Timur Tengah. Salah satu strategi Amerika Serikat di Timur Tengah adalah mendorong dilakukannya reformasi politik, ekonomi,

¹¹² Bennis, opcit, hal. 43

¹¹³ Ibid, hal. 44

pendidikan dan agama.¹¹⁴ Amerika Serikat sebagai negara dan pendorong paham liberal berupaya mempengaruhi negara lain untuk melakukan liberalisasi di bidang politik, ekonomi, pendidikan dan agama. Mayoritas negara-negara Arab yang ada di kawasan Timur Tengah masih merupakan negara-negara berkembang yang sistem politik dan ekonominya belum stabil. Sedangkan potensi ekonomi di kawasan tersebut sangat besar, baik dilihat dari sumberdaya minyak maupun sebagai pasar potensial. Itulah sebabnya Amerika Serikat memandang kawasan Timur Tengah sebagai kawasan yang menjanjikan di masa mendatang. Oleh karena itulah kawasan Timur Tengah yang stabil merupakan kepentingan nasional Amerika Serikat agar agenda liberalisasi Amerika Serikat dapat dilaksanakan.

Sejak saat itu hingga terjadinya invasi Irak terhadap Kuwait, peranan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah lebih meningkat lagi seiring dengan peningkatan konflik Israel dan Palestina. Sementara itu kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah tidak berubah yaitu: akses terhadap minyak khususnya bagi kebutuhan domestik Amerika Serikat dan kebutuhan sekutu Amerika Serikat di Eropa dan Jepang, melindungi dan mempertahankan Israel serta memelihara stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan untuk mendorong liberalisasi politik, ekonomi, pendidikan dan agama di Timur Tengah. Invasi Irak terhadap Kuwait telah menciptakan dasar baru bagi penegasan kembali tentang dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah.

B. Upaya Amerika Serikat untuk Menyelesaian Kasus Invasi Irak.

Walaupun pada saat awal setelah terjadinya invasi Irak terhadap Kuwait, Amerika seolah-olah ragu-ragu untuk mengambil sikap. Namun dengan desakan dan permintaan Inggris, akhirnya Amerika Serikat mau bertindak tegas terhap Irak. Amerika Serikat memberikan peluang kepada negara-negara Arab untuk menyelesaikan persoalan konflik antar negara Arab oleh Bangsa Arab sendiri. Namun dalam hal itu Amerika Serikat memberikan waktu dua kali dua puluh empat jam bagi apara pemimpin Arab untuk menyelesaikan konflik antara Irak dan Kuwait. Ternyata waktu yang diberikan oleh Amerika Serikat tidak dapat menyelesaikan konflik, maka Amerika Serikat mengambil alih persoalan tersebut dengan melakukan diplomasi untuk menekan Irak agar keluar dari Kuwait. Bersamaan dengan upaya diplomasi, Amerika Serikat juga

¹¹⁴ Ivo Daalder, Nicole Gnesotto, Philip Gordon, *Crescent of Crisis, US-European Strategy For the Greater Middle East*, Brooking Institution Press, Washington D.C, 2006, hal. 45

melakukan pembangunan kekuatan militer di Kawasan Teluk. Atas permintaan Arab Saudi, Presiden Walker Herbert Bush menggelar 40.000 pasukan militer Amerika Serikat di Arab Saudi.¹¹⁵

Setelah mempelajari situasi bersama para penasehatnya Presiden Bush menyatakan bahwa: “ *Let me tell you that the United States strongly condemns the invasion and calls for an immediate withdrawal.*”¹¹⁶ Keluarga Bush telah memperoleh keuntungan dari bisnis minyak dan hubungan dengan keluarga Kerajaan Arab Saudi. Mereka juga memperoleh keuntungan dari bisnisnya dengan Kuwait. Presiden Bush merasa khawatir bahwa Saddam Hussein akan menambah kekayaannya dari negara-negara Arab. Oleh karena itu Presiden Bush mengatakan kepada penasehatnya bahwa Saddam Hussein akan memiliki kemampuan untuk memanipulasi harga minyak dunia dan menahan sandera asing untuk tujuan politiknya. Kekuatan ekonomi ditambah satu juta tentara akan merubah Saddam Hussein menjadi figur yang sangat kuat di Kawasan Teluk dan pesaing utama di dunia.¹¹⁷ Atas desakan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher, akhirnya Presiden Bush menyetujui untuk menggunakan kekuatan militernya dalam menyelesaikan konflik Irak dan Kuwait.

Sementara itu satelit mata-mata Amerika Serikat mengindikasikan tentara Irak terus melakukan gerakan ke Selatan hingga perbatasan Arab Saudi. Apabila Irak akan melanjutkan invasinya ke Arab Saudi, maka tidak pilihan lain bagi Amerika Serikat untuk melakukan tindakan militer. Pada tanggal 3 Agustus 1990 Presiden Bush menelepon Raja Fahd untuk memperingatkan Arab Saudi akan kemungkinan serangan dari Irak, namun jawaban Raja Fahd bahwa dia masih mengharapkan perundingan damai dengan Saddam Hussein. Presiden Bush menyampaikan; “Apabila situasi memburuk apakah Raja Fahd akan menerima bantuan militer Amerika Serikat ?. Raja Fahd menjawab bahwa apabila situasi memburuk Arab Saudi akan menerimanya.”¹¹⁸ Walaupun sebelumnya Presiden Bush memberikan jaminan kepada Raja Hussein dari Yordania untuk memberikan kesempatan bangsa Arab untuk menyelesaikan konflik oleh bangsa Arab sendiri, namun Presiden Bush tetap mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah menggerakkan Armada lautnya ke Kawasan Teluk. Pada tanggal 3 Agustus 1990 Presiden Bush menginstruksikan Penasehat Keamanan Nasional Brent Scowcroft untuk meminta negara-negara Arab agar mencegah invasi Irak terhadap Kuwait. Presiden

¹¹⁵ Hiro, opcit, hal. 36

¹¹⁶ Lando, opcit, hal.132

¹¹⁷ Ibid, hal. 133

¹¹⁸ Ibid, hal 135

Bush juga mengirim Asisten Menlu John Kelly untuk menyampaikan pesan bagi Menlu Mesir di Kairo yang meminta agar Mesir dan negara-negara Arab lainnya untuk berdiri bersama Amerika Serikat melawan Irak. Mesir memberikan jawaban cepat dengan menyampaikan pernyataan mengecam tindakan invasi Irak. Demikian juga Liga Arab dengan mengacuhkan penolakan Raja Hussein mengeluarkan pernyataan yang mengutuk invasi Irak dan meminta Irak untuk segera mundur dari Kuwait. Pada tanggal 4 Agustus 1990 Presiden Bush melakukan pertemuan dengan Emir Kuwait yang dapat melarikan diri sebelum serbuan tentara Irak. Presiden Bush pada tiga puluh tahun sebelumnya ketika dia menjadi Direktur Zapata Off-Shore Petroleum telah memperoleh konsesi minyak di pantai Kuwait atas persetujuan Keluarga Emir Kuwait. Atas dasar itulah Presiden Bush dalam pertemuan itu berjanji tidak hanya mengeluarkan Saddam Hussein dari Kuwait, tapi juga akan mengembalikan kekuasaan dan kedaulatan Emir Kuwait di negaranya.

Pada tanggal 5 Agustus 1990 Presiden Bush menyatakan bahwa Irak telah melanggar hukum internasional. Pernyataan Presiden Bush ini berarti Amerika Serikat akan melakukan tindakan apapun termasuk penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait. Yang menjadi masalah bagi Amerika Serikat adalah bagaimana meyakinkan Arab Saudi agar pasukan Amerika Serikat dapat ditempatkan di Arab Saudi sebagai daerah persiapan untuk melancarkan serangan terhadap Irak. Untuk kepentingan itu maka dikirimlah Delegasi Amerika Serikat dibawah pimpinan Menhan Dick Cheney untuk meyakinkan Pemerintah Saudi Arabia dengan memperlihatkan foto-foto satelit yang menunjukkan pembangunan kekuatan militer Irak di perbatasan Arab Saudi. Walaupun mendapat penolakan dari beberapa anggota Keluarga Kerajaan, namun akhirnya Raja Fahd menyetujui untuk menerima lebih dari 150.000 personel militer Amerika Serikat. Pada tanggal 7 Agustus 1990 Presiden Bush menegaskan bahwa Pasukan Amerika Serikat hanya untuk defensif dengan empat tujuan yaitu : Irak segera keluar dari Kuwait tanpa syarat, mengembalikan legitimasi Pemerintahan Kuwait, keamanan kawasan Teluk khususnya untuk cadangan minyak dan melindungi kehidupan bangsa Amerika¹¹⁹. Penempatan Pasukan Amerika Serikat di Arab Saudi dilaksanakan dalam bentuk Operasi Tameng Gurun (*Operations Desert Shield*) untuk melindungi Arab Saudi dari intervensi militer Irak. Presiden Bush juga menyatakan bahwa embargo terhadap Irak terus dilanjutkan.

¹¹⁹ Ibid, hal 139

Sementara itu Kongres Amerika Serikat memberikan otorisasi penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait. Mayoritas anggota Senat maupun anggota DPR Amerika Serikat menyetujui untuk memberikan otorisasi kepada Presiden Bush untuk menggunakan kekuatan militer dan mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB.¹²⁰ Untuk itulah Presiden Bush dan Menlu James Baker bekerja siang malam dengan cara membujuk, menekan dan menakut-nakuti untuk membangun koalisi internasional termasuk negara-negara Arab. Amerika Serikat juga membutuhkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan Liga Arab untuk mengecam Irak. Mesir adalah negara Arab pertama yang mengecam tindakan invasi Irak, setelah Amerika mengancam akan menghentikan bantuan 2 Milyar US Dollar apabila Mesir tidak mengecam Irak. Mesir juga menyetujui untuk mengirimkan tentaranya ke Arab Saudi sebagai bagian dari Pasukan Gabungan Arab. Atas kemauan dan tindakan Mesir itu, Amerika Serikat membebaskan hutang Mesir kepada Amerika Serikat sebesar 6.75 Milyar US Dollar dan negara-negara Teluk membebaskan hutang Mesir sebesar 7 Milyar US Dollar. Demikian juga Siria mengirim pasukannya ke Arab Saudi setelah memperoleh jaminan untuk mengontrol sebagian besar wilayah Lebanon. Siria juga memperoleh janji untuk mendapatkan 5 Milyar US Dollar dari negara-negara Arab termasuk 200 Juta US Dollar dari Masyarakat Eropa dan pinjaman 500 Juta US Dollar dari Jepang¹²¹. Disamping itu Masyarakat Eropa mencabut sanksi ekonomi terhadap Siria dan Inggris memulihkan hubungan diplomatiknya.

Sementara itu Amerika Serikat meletakkan perang melawan Irak sebagai kepentingan bersama untuk menggalang dukungan dana bagi pembiayaan pembangunan kekuatan militer di kawasan Teluk. Oleh karena itulah banyak negara yang menyiapkan tentaranya atas nama prinsip-prinsip perdamaian yang abadi dan keamanan dunia. Atas desakan Amerika Serikat dalam beberapa bulan telah terkumpul lebih dari 25 Milyar US Dollar dari negara-negara yang khawatir atas kepentingan negaranya terancam. Salah satu donor yang paling besar adalah Arab Saudi yang memberikan 4,5 Milyar US Dollar, Keluarga Emir Kuwait memberikan 5 Milyar US Dollar, Jepang dan Jerman yang negaranya tergantung dari minyak Timur Tengah memberikan masing-masing 1.3 Milyar US Dollar dan selebihnya dari negara-negara penghasil minyak¹²². Dengan dana itulah Amerika Serikat membangun kekuatan militernya dan

¹²⁰ Hiro, *opcit*, hal. 36

¹²¹ Lando, *opcit*, hal 141

¹²² *Ibid*, hal 142

membentuk Pasukan Koalisi di Arab Saudi. Dalam pembentukan Pasukan Koalisi internasional, Amerika Serikat didukung oleh Inggris, Perancis, Canada, Italia, Australia, Spanyol, Yunani, Turki, Norwegia, Denmark, Belgia dan Argentina.¹²³

Pada tanggal 25 Agustus 1990 Amerika Serikat mendapatkan dukungan dari Uni Soviet di Dewan Keamanan PBB dalam mengeluarkan resolusi 678 yang memberikan mandat penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait. Begitu Uni Soviet bergabung dengan koalisi internasional, maka Arab Saudi memberikan 1 Milyar US Dollar kepada Uni Soviet. Pada tanggal 17 September 1990 Saddam Hussein menawarkan negosiasi melalui Wakil Perdana Menteri Tariq Aziz yang mengatakan bahwa Irak akan menarik pasukannya dari Kuwait apabila diikuti dengan konferensi internasional untuk menyelesaikan masalah Palestina. Pada saat yang sama Saddam Hussein juga mengatakan kepada para diplomat Arab bahwa dia akan mempertimbangkan keluar dari Kuwait apabila ada keuntungan nyata bagi Bangsa Arab seperti persetujuan Amerika Serikat untuk melakukan konferensi internasional bagi penyelesaian konflik Palestina-Israel. Pada tanggal 21 September 1990 setelah tawaran damai Saddam Hussein ditolak oleh Amerika Serikat, Saddam Hussein menyatakan bahwa : "Saat ini tidak ada lagi kesempatan untuk mundur. Agar dimengerti oleh setiap orang bahwa perang ini akan menjadi Ibu dari segala peperangan (*the mother of all Battles*)".¹²⁴

Pada tanggal 11 Oktober 1990 Presiden Bush melakukan perang media dengan menyatakan bahwa "Kita menginginkan Saddam keluar dari Kuwait, saya mengharap rakyat Irak melakukan sesuatu untuk itu." Pada tanggal 31 Oktober 1990 Presiden Bush memberikan perintah untuk meningkatkan kekuatannya di Kawasan Teluk. Namun untuk melakukan tindakan militer terhadap Irak, Amerika Serikat membutuhkan mandat dari Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itulah Amerika Serikat mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bersidang agar mengeluarkan resolusi sesuai kehendak Amerika Serikat. Pada tanggal 29 Nopember 1990 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 678 Dewan Keamanan PBB sebagai hasil dari diplomasi, pendekatan, bujukan, sogokan dan tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara-negara Anggota Tetap dan Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

Dalam menghadapi penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait itu masyarakat Amerika Serikat terbagi dua, ada yang menghendaki cukup dengan

¹²³ Simpson, opcit, 170

¹²⁴ Lando, opcit, hal 145

pemberian sanksi ekonomi dan ada juga yang menghendaki penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait. Pemungutan suara di Senat Amerika Serikat menunjukkan 53 suara mendukung dan 47 suara menolak pemberian otorisasi kepada Presiden Bush untuk melakukan operasi militer sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Resolusi 678 Dewan Keamanan PBB. Sedangkan di DPR Amerika Serikat menunjukkan 250 suara mendukung dan 183 menolak. Dengan demikian Presiden Bush mempunyai kekuatan dan otorisasi untuk menggunakan kekuatan militer Amerika Serikat untuk mengusir Irak dari Kuwait.

Pada tanggal 2 Januari 1990 Saddam Hussein menawarkan negosiasi lagi dengan mengatakan bahwa dia meminta agar dalam pengunduran pasukannya dari Kuwait tidak akan ditembak dan masalah Palestina dia hanya meminta untuk dibicarakan dalam waktu dekat. Namun tawaran Saddam Hussein ini ditolak oleh Amerika Serikat. Presiden Bush dan penasehat militernya telah memilih waktu yang tepat untuk melancarkan serangan udara, yaitu pada tanggal 17 Januari 1991 pada jam 03.00 pagi hari.¹²⁵ Namun demikian sebagai upaya perdamaian terakhir, Presiden Bush setuju untuk mengirim Menlu James Baker untuk menemui Tariq Aziz di Jenewa pada tanggal 9 Januari 1991. Menlu James Baker tetap bersikeras agar Irak mundur dari Kuwait tanpa syarat. Menlu Baker menyerahkan surat Presiden Bush untuk Saddam Hussein. Setelah membaca surat yang bernada keras dari Presiden Bush, Tariq Aziz menyatakan bahwa surat itu merupakan penghinaan terhadap Presiden Saddam Hussein dan Presiden Saddam Hussein pasti tidak akan mau menerimanya. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa dan gagal total. Akhirnya pada tanggal 17 Januari 1991 Jam 03.00 pagi hari waktu Bagdad Operasi Badai Gurun dilancarkan.

C. Operasi Badai Gurun (*Operation Desert Storm*).

Operasi militer yang dilakukan oleh Pasukan Koalisi pimpinan Amerika Serikat dengan sandi "Operasi Badai Gurun" merupakan implementasi dari Resolusi 678 Dewan Keamanan PBB. Operasi militer ini dilancarkan dalam upaya mengusir Irak dari Kuwait dan memulihkan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah serta mengembalikan kedaulatan negara dan Pemerintah Kuwait.

¹²⁵ Ibid, hal 151

Operasi Badai Gurun dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap operasi serangan udara dan operasi darat gabungan. Operasi serangan udara dimulai satu hari setelah batas waktu untuk Irak keluar dari Kuwait sesuai Resolusi 678 Dewan Keamanan PBB tidak dipatuhi oleh Irak. Operasi serangan udara itu melibatkan pesawat tempur dari berbagai negara yang terlibat dalam Pasukan Koalisi pimpinan Amerika Serikat, yaitu pesawat tempur dari Amerika Serikat, Inggris, Bahrain, Kanada, Perancis, Itali, Kuwait, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Serangan udara dimulai oleh serbuan 9 Helikopter Apache untuk menghancurkan Radar Peringatan Dini (*Early Warning Radar*) di Wilayah Irak Barat yang akan membahayakan gerakan Pasukan Koalisi. Selanjutnya Pasukan Koalisi mengerahkan pesawat tempur Stealth, Bomber Jarak Jauh dan pesawat tempur Bomber Konvensional. 10 pesawat tempur Stealth dikerahkan pada tgl. 16 Januari 1991 dini hari untuk menghancurkan Komando Pertahanan Udara Irak di Selatan Irak dan Pusat telekomunikasi di Bagdad. Tujuh Bomber B52G diluncurkan dari pangkalannya di Louisiana Amerika Serikat dan 15 jam kemudian pesawat Pembom itu menjatuhkan 35 Bom AGM-86C ALCMs yang dilengkapi dengan kepala perang yang sangat akurat. Amerika Serikat juga mengirim pembom tempurnya dari Diego Garcia yang menjatuhkan bom yang berdampak besar seperti gempa bumi lokal. Dengan bom itu diharapkan dapat menurunkan moril dan semangat tempur pasukan Irak. Secara bertahap dan silih berganti semua pesawat tempur dan pembom tempur Pasukan Koalisi melakukan serangan udara terhadap sasaran-sasaran strategis di Irak. Hampir 700 pesawat tempur dikerahkan setiap malamnya dengan didukung oleh pesawat tanker dan pesawat pengendali E-3A AWACS. Secara umum serangan udara Pasukan Koalisi selama Perang Teluk I telah meluncurkan 110.000 sorti serangan udara dan telah menjatuhkan 90.000 Ton Bom¹²⁶. Serangan udara itu telah menghancurkan Pusat Telekomunikasi, Pusat Kendali dan Komando Pasukan Irak, infra struktur pertahanan Irak, menghancurkan pesawat tempur dan sistem pertahanan udara Irak.

Angkatan Laut Amerika Serikat yang didukung oleh Pasukan Marinirnya adalah kekuatan militer Amerika Serikat yang pertama yang didatangkan ke kawasan Teluk. Pasukan inilah yang melakukan Operasi Tameng Gurun (*Operations Desert Shield*) dalam upaya melindungi Arab Saudi dari intervensi militer Irak. Dalam operasi Laut ini Pasukan Koalisi diperkuat oleh kekuatan laut dari Amerika Serikat, Argentina, Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Yunani, Italia, Belanda, Norwegia, Portugis, Arab

¹²⁶ Finlan, opcit, hal. 37

Saudi, Turki dan Spanyol¹²⁷. Amerika Serikat mengerahkan enam Armada Tempur Kapal Induk untuk mendukung Operasi Badai Gurun. Peranan Angkatan laut dalam Operasi Badai Gurun ini disamping untuk mendukung operasi serangan udara, juga untuk melancarkan Operasi Amfibi terhadap Kuwait oleh Pasukan Marinir Amerika Serikat. Kapal-kapal perang Angkatan laut meluncurkan Rudal Tomahawk yang merupakan rudal dengan presisi tinggi dan mempunyai jarak jangkauan ke sasaran jauh. Dari laut di Kawasan Teluk kapal-kapal perang Angkatan Laut telah meluncurkan 300 rudal Tomahawk selama Perang Teluk I dan dapat menghancurkan sasaran-sasaran strategis di pedalaman Irak termasuk Bagdad. Penggunaan Rudal Tomahawk itu dimaksudkan untuk menghindari korban besar di kalangan masyarakat sipil.¹²⁸

Setelah melakukan serangan udara yang sangat intensif, Pasukan Koalisi melancarkan operasi darat gabungan. Operasi darat gabungan dimulai pada jam 04.00 waktu setempat tanggal 24 Februari 1991. Korps Lintas Udara XVIII melancarkan serangan darat bersama-sama Korps VII untuk menghancurkan Pasukan Garda Republik dan melakukan penyekatan serta mencegah perkuatan Pasukan Irak terhadap pasukannya di Kuwait. Divisi VI Tank Ringan Perancis dan Divisi Lintas Udara ke-101 melakukan serangan dan menduduki posisi strategis untuk menyiapkan pangkalan dukungan logistik bagi pasukan berikutnya. Pada hari pertama Korps Lintas Udara XVIII telah mampu mengalahkan Pasukan Irak dan dapat menduduki wilayah Irak sejauh 273 kilometer dan akibat serangan itu banyak tentara Irak yang menyerahkan diri.¹²⁹

Kamajuan serangan Korps Lintas Udara XVIII itu membuat Panglima Pasukan Koalisi Jenderal Norman Swarzkofit mempercepat gerakan pasukannya. Korps VII yang didukung oleh hampir 150.000 tentara dan 400 tank berat melancarkan serangan terhadap Pasukan Garda Republik yang berada di Kuwait. Untuk melancarkan serangan terhadap Tentara Irak dan untuk merebut kembali Kuwait, Pasukan Koalisi disamping mengerahkan Korps VII juga didukung oleh Pasukan Ekspedisi Marinir Ke-1 dan Komando Gabungan Utara yang terdiri dari Pasukan Militer dari Mesir, Arab Saudi, Kuwait dan Siria sebagai Pasukan Cadangan. Disamping itu Pasukan Koalisi mengerahkan juga Komando Gabungan Timur yang terdiri Pasukan Militer Kuwait, Qatar, Oman dan Arab Saudi untuk merebut Kota Kuwait dengan melalui poros menyusuri pantai Timur Kuwait. Dalam mendukung Operasi Badai Gurun ini, Pasukan

¹²⁷ Ibid, hal. 40

¹²⁸ Simpson, opcit, hal. 169

¹²⁹ Finlan, opcit, hal. 57

Koalisi pimpinan Amerika Serikat mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuannya yang melibatkan peralatan dan persenjataan yang canggih serta dilengkapi dengan sistem komando, kendali dan komunikasi yang canggih pula. Melalui pertempuran yang cukup berat antara Pasukan Koalisi dan Pasukan Irak, akhirnya seluruh Kuwait dapat direbut dan Pasukan Irak dapat dipukul mundur dari Kuwait. Pada tanggal 27 Februari 1991 seluruh wilayah Kuwait dapat dibebaskan dan sore harinya gencatan senjata antara Pasukan Koalisi dan Irak dinyatakan berlaku.¹³⁰ Operasi Badai Gurun ini merupakan implementasi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 678 sebagai hasil dari kolaborasi dan interdependensi antara PBB dan Amerika Serikat dalam upaya menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait untuk memulihkan keamanan dan perdamaian internasional, dan juga untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional Amerika Serikat.

Kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah seperti telah dijelaskan di atas adalah minyak, Israel dan stabilitas kawasan. Dalam hal kepentingan minyak, Amerika Serikat tidak menghendaki ada sebuah negarapun di Timur Tengah yang dapat mendominasi cadangan, pengelolaan dan pemasaran minyak. Disamping itu Israel sebagai negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah yang sangat setia harus selalu dilindungi. Tidak ada satu negarapun yang boleh mengganggu Israel. Apabila ada negara yang akan mengganggu Israel, maka Amerika Serikat akan turun tangan. Demikian juga masalah stabilitas kawasan Timur Tengah telah menjadi kepentingan nasional Amerika Serikat, karena kawasan Timur Tengah yang stabil akan memberikan dampak positif bagi liberasi politik, ekonomi, pendidikan dan agama di kawasan Timur Tengah. Itulah sebabnya maka ketika Irak melakukan invasi terhadap Kuwait, hal itu dipandang sebagai hal yang sangat membahayakan bagi kepentingan nasional Amerika Serikat.

Untuk menghentikan invasi Irak dan mengusir Irak dari Kuwait, Amerika Serikat melakukan segala upaya menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah diplomasi dengan cara-cara damai dan diplomasi kekerasan. Diplomasi dengan cara-cara damai dilakukan melalui jalur-jalur diplomasi dengan menggunakan forum bilateral maupun multilateral. Amerika Serikat pada awalnya memberikan kesempatan kepada Pemimpin negara-negara Arab untuk menyelesaikan konflik antar negara Arab oleh bangsa Arab sendiri, namun upaya itu

¹³⁰ Ibid, hal. 65

gagal, karena Saddam Hussein bersikukuh bahwa Irak mau mundur dari Kuwait. Selanjutnya Amerika Serikat melakukan diplomasi kekerasan dengan mengancam dengan kekuatan militer apabila Irak tidak mundur dari Kuwait. Agar ancaman itu dapat diwujudkan, maka Amerika Serikat berupaya mempengaruhi Dewan Keamanan PBB agar dapat memberikan mandat penggunaan kekuatan militer terhadap Irak. Untuk itu Amerika Serikat melakukan tekanan, bujukan dan bahkan sogokan agar semua anggota tetap maupun tidak tetap Dewan Keamanan PBB dapat menyetujui dikeluarkannya Resolusi 678 dan hal itu berhasil. Setelah Resolusi 678 dikeluarkan, Dewan Keamanan PBB juga tidak dapat berbuat apa-apa, karena Dewan Keamanan PBB tidak mempunyai kekuatan militer yang langsung dibawah komandonya. Dalam situasi itulah Amerika Serikat sebagai negara adidaya dengan kekuatan ekonomi dan militernya yang sangat besar mampu mempengaruhi negara-negara anggota PBB untuk memberikan kontribusi pasukan militer maupun dana untuk mendukung operasi militer yang akan digelar dan sekaligus memimpin Pasukan Koalisi untuk mengusir Irak dari Kuwait.

Operasi Badai Gurun merupakan keberhasilan Amerika Serikat untuk melaksanakan mandat Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Resolusi 678. Amerika Serikat yang didukung oleh Inggris, Perancis, Jerman, Jepang dan khususnya dukungan dari Arab Saudi dan Kuwait telah mampu mengumpulkan dana yang sangat besar untuk membiayai Operasi Badai Gurun. Disamping itu Amerika Serikat juga mampu menggalang dukungan internasional untuk memberikan kontribusi pasukannya untuk bergabung dalam Pasukan Koalisi. Dengan kekuatan militer gabungan dan didukung oleh peralatan dan persenjataan yang canggih serta didukung oleh sistem komando, kendali dan komunikasi yang canggih pula Kuwait dapat direbut dan dibebaskan dalam waktu tiga hari. Semua proses dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait seperti dijelaskan diatas menunjukkan adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat.

BAB V

KERJASAMA PBB-AMERIKA SERIKAT

Berdasarkan fakta dan data yang didapat dari bab-bab sebelumnya, bab ini akan membahas dan menganalisis adanya kerjasama PBB-Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Keterkaitan PBB dalam kasus invasi Irak terhadap Kuwait akan mengawali analisis terjadinya ketergantungan PBB kepada Amerika Serikat yang menimbulkan kerjasama PBB-Amerika Serikat. Dalam hal ini akan dibahas bagaimana PBB sesuai dengan Piagam PBB harus melakukan upaya penyelesaian atas terjadinya pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Irak. PBB melalui Dewan Keamanan PBB dengan dukungan para anggotanya mengeluarkan resolusi-resolusi untuk memaksa Irak keluar dari Kuwait. Dukungan utama datang dari Amerika Serikat, tanpa dukungan Amerika Serikat Dewan Keamanan PBB tidak dapat berbuat banyak. Selanjutnya dibahas tentang keterkaitan Amerika Serikat dalam kasus invasi Irak. Disini akan dibahas bagaimana Amerika Serikat juga harus bekerjasama dengan PBB dalam upayanya mengusir Irak dari Kuwait. Amerika yang merasa terancam kepentingannya oleh invasi Irak terhadap Kuwait berupaya untuk menghentikan langkah Irak dan mengusir Irak dari Kuwait. Upaya Amerika Serikat itu sangat tergantung kepada Dewan Keamanan PBB, karena Amerika Serikat memerlukan mandat Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan kekuatannya terhadap Irak. Selanjutnya dengan menggunakan pisau analisis teori interdependensi, teori keamanan kolektif dan teori kolaborasi akan dibahas dan dianalisis adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat yang dapat menjawab permasalahan dalam tesis ini.

A. Analisis Keterkaitan PBB dalam Kasus Invasi Irak.

Sesuai dengan Piagam PBB yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota PBB, salah satu tujuan PBB adalah menjaga dan memelihara keamanan dan perdamaian internasional. PBB harus dapat mencegah terjadinya agresi oleh sebuah negara terhadap negara lainnya dan menyelesaikan konflik sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Invasi Irak terhadap Kuwait merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB. Invasi militer yang dilakukan Irak juga merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum internasional. Sistem keamanan kolektif yang

telah disepakati dalam bentuk Piagam PBB tidak dipatuhi oleh Irak dan justru Irak melanggar keamanan kolektif yang telah ditandatanganinya.

Irak merasa bahwa tidak ada negara-negara yang mau membantu Irak dalam menghadapi kesulitan ekonominya akibat perang dengan Iran. Irak memandang Arab Saudi dan Kuwait yang dianggap sebagai sesama negara Arab yang bertetangga justru bersekutu dengan Amerika Serikat untuk menghancurkan Irak. Oleh karena itu Irak bersikeras untuk menekan Kuwait agar memberikan bantuan ekonomi terhadap Irak. Intimidasi dan invasi militer merupakan pelanggaran dan ancaman terhadap keamanan kolektif. Oleh karena itulah PBB segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait itu.

Dalam menghadapi sebuah negara yang nyata-nyata melanggar hukum dan ketentuan internasional, PBB melakukan langkah-langkah diplomasi damai dengan cara meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera bersidang dan menentukan sikap. Untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait ini, Dewan Keamanan PBB segera mengundang negara-negara anggotanya untuk melakukan sidang darurat. Karena jelas-jelas Irak telah melanggar Piagam PBB dan keamanan kolektif, maka Dewan Keamanan tanpa mengalami hambatan yang berarti dapat mengeluarkan resolusi 660 yang menyatakan Irak harus segera mundur dari Kuwait tanpa syarat. Karena Irak tidak mau mematuhi Resolusi 660, maka Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi-resolusi berikutnya. Namun resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB tetap tidak dihiraukan oleh Irak. Untuk memperkuat resolusi-resolusinya, PBB juga melakukan diplomasi-diplomasi damai melalui Sekjen PBB agar Irak mau mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah dikeluarkan dan meminta Irak segera keluar dari Kuwait. Upaya yang dilakukan PBB tidak juga membuat Irak mau mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB dan upaya diplomasi pun gagal.

PBB mempunyai kepentingan dalam menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. PBB yang merupakan organisasi internasional dan dipercaya oleh seluruh anggotanya harus melakukan segala upaya dan tindakan untuk menjaga dan memelihara keamanan dan perdamaian internasional harus melakukan tindakan nyata terhadap Irak. Invasi Irak terhadap Kuwait merupakan tindakan yang mengganggu stabilitas keamanan dan perdamaian Timur Tengah. PBB yang telah banyak menggelar operasi perdamaian di Timur Tengah merasa bahwa tindakan Irak itu menambah beban PBB dalam menegakan, menjaga dan memelihara keamanan dan perdamaian di Timur Tengah. Oleh karena itulah PBB melakukan segala cara dan upaya untuk mengusir Irak

dari Kuwait, mengembalikan kekuasaan Pemerintahan Kuwait yang sah dan memulihkan keamanan dan perdamaian di Kawasan Timur Tengah.

Upaya terakhir Dewan Keamanan PBB adalah mengeluarkan Resolusi 678 yang berisikan pemberian mandat kepada Amerika Serikat untuk menggunakan kekuatan militernya mengusir Irak dari Kuwait. Mandat itu adalah yang pertama kalinya dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB sejak terjadinya Perang Dingin dalam upaya mengembalikan dan menegakan keamanan dan perdamaian internasional. Selama Perang Dingin setiap upaya intervensi militer oleh anggota PBB selalu diveto dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat akan memveto penggunaan kekuatan militer terhadap sebuah negara apabila negara tersebut berada dalam pengaruhnya. Demikian juga Uni Soviet akan memveto intervensi militer terhadap sebuah negara yang melanggar Piagam PBB, apabila negara tersebut berada dalam pengaruhnya. Keluarnya resolusi 678 merupakan hasil diplomasi Amerika Serikat dalam meyakinkan Uni Soviet dan negara-negara yang mempunyai Hak Veto untuk tidak membantu Irak dan meminta mereka untuk mengecam tindakan invasi Irak. Demikian juga Amerika Serikat melakukan pendekatan terhadap China agar tidak menggunakan Hak Vetonya dalam kasus invasi Irak dan berhasil. Pada akhirnya Dewan Keamanan PBB dapat mengeluarkan resolusi yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat untuk mengusir Irak dari Kuwait. Disini menunjukkan bahwa Amerika Serikat mempunyai peranan besar dalam setiap langkah diplomasi dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh PBB. Oleh karena itu dalam upaya penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait, maka PBB harus melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat.

B. Analisis Keterkaitan Amerika Serikat dalam Kasus Invasi Irak.

Melihat sejarah, kepentingan nasional Irak dan ambisi Saddam Hussein nampak dengan jelas bahwa Irak memang berambisi untuk menjadi negara yang berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Pada era Saddam Hussein, Irak menyerang Iran dan menduduki beberapa wilayah Iran sebelum dipukul mundur ke wilayahnya ketika terjadi Perang Delapan Tahun dengan Iran. Setelah perang dengan Iran usai banyak masalah yang timbul di dalam negeri Irak. Perekonomian Irak mengalami penurunan yang drastis. Sebelum perang, Irak merupakan negara yang kaya, namun setelah perang selesai Irak menjadi negara penghutang yang besar. Untuk membiayai pembangunan kembali perekonomian dan rekonstruksi infrastruktur yang hancur, Irak tidak mempunyai

dana yang cukup. Satu-satunya sumber dana yang ada hanya dari minyak, sedangkan harga minyak dunia pada saat itu pada posisi yang sangat rendah. Disamping itu kredibilitas Saddam Hussein mulai turun karena tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Dalam situasi negara seperti itu Saddam Hussein mencari jalan keluar dengan mencari dukungan dan bantuan ekonomi dari negara-negara tetangganya seperti Arab Saudi dan Kuwait. Dalam hubungan ini Irak berpandangan bahwa Irak telah berjasa kepada kedua negara itu, karena Irak telah melawan dan melindungi mereka dari serangan kaum Shiah Iran dengan melakukan perang dengan Iran selama delapan tahun. Namun permintaan Irak tidak ditanggapi oleh Arab Saudi maupun Kuwait. Disamping itu untuk memperkuat pengaruhnya di Kawasan Teluk, Irak membutuhkan akses ke laut. Satu-satunya akses yang mungkin dapat diperoleh adalah dengan menguasai Kuwait. Oleh karena itulah Irak berupaya mendapatkan akses ke laut itu dari Kuwait, sehingga hal tersebut menjadi ajang konflik antar kedua negara. Perselisihan antara Irak dan Kuwait masih sering terjadi terutama di wilayah perbatasan. Irak menuduh Kuwait telah mencuri minyak Irak di wilayah Ratga dan Rumailah. Namun perselisihan itu tidak pernah diakhiri dengan konflik bersenjata. Ambisi Saddam Hussein yang ingin menjadi Pemimpin Dunia Arab mengakibatkan Saddam Hussein terus memperkuat negaranya agar dapat "menguasai" Timur Tengah. Sejarah masa lalu Irak yang wilayahnya hingga Kuwait hanya merupakan alasan pembenar bagi Saddam Hussein untuk menduduki Kuwait, padahal alasan utama Irak menduduki Kuwait adalah Irak ingin mendapatkan akses yang luas ke laut, menguasai cadangan minyak yang sangat besar dan ingin menunjukkan kekuatan Irak sebagai Pemimpin Bangsa Arab.

Alasan utama Irak menduduki Kuwait itulah yang berbenturan dengan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Bagi Amerika Serikat, Timur Tengah merupakan kawasan yang harus berada dibawah pengaruhnya. Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah adalah minyak, Israel dan stabilitas kawasan. Minyak merupakan komoditi strategis bagi Amerika Serikat, disamping merupakan kebutuhan strategis untuk dalam negeri Amerika Serikat, namun juga untuk mendukung industri di Eropa dan Asia Timur khususnya Jepang. Apabila cadangan strategis minyak Timur Tengah dikuasai oleh Irak, maka hal itu akan merupakan malapetaka bagi Amerika Serikat. Irak dapat menentukan harga minyak dunia dan juga Irak dapat menjadikan minyak sebagai senjata melawan negara-negara Barat. Hal itulah yang membuat kekhawatiran Amerika Serikat. Oleh karena

itulah dengan adanya invasi Irak terhadap Kuwait merupakan serangan langsung terhadap kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Israel merupakan satu-satunya sekutu Amerika Serikat yang patuh dan dapat dipercaya oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu apapun yang terjadi terhadap Israel, Amerika akan terus membantunya. Perang-perang yang dilakukan Israel dengan negara-negara tetangga Arab sejak berdirinya senantiasa dibantu dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat memandang bahwa Israel adalah kekuatan penyeimbang bagi stabilitas keamanan dan perdamaian Timur Tengah. Ambisi Saddam Hussein dan tindakan invasi Irak terhadap Kuwait merupakan ancaman langsung bagi eksistensi dan kredibilitas Israel. Apabila Timur Tengah dibawah pengaruh Irak, maka keberadaan dan kedaulatan Israel akan terancam. Disamping itu bagi Amerika Serikat, invasi Irak merupakan ancaman terhadap dominasi dan hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah.

Kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah yang tidak kalah pentingnya adalah adanya stabilitas keamanan dan perdamaian di Timur Tengah. Bagi Amerika Serikat, kawasan Timur Tengah adalah kawasan yang harus dijaga dan dipelihara stabilitasnya, karena di kawasan itu berada sumber minyak dan pasar yang potensial bagi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Sumber minyak dan pasar merupakan hal yang sangat vital bagi perekonomian Amerika Serikat. Oleh karena itu apapun yang akan terjadi Amerika Serikat akan mempertahankan mati-matian kepentingan nasionalnya itu. Dengan adanya invasi Irak terhadap Kuwait, tidak ada pilihan lain bagi Amerika Serikat kecuali menghentikan ambisi Irak dan mengusir Irak dari Kuwait dalam rangka menjaga kepentingan nasionalnya.

Upaya Amerika Serikat untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait dilakukan dengan cara-cara damai maupun dengan ancaman kekerasan. Amerika Serikat melakukan langkah-langkah diplomasi untuk meminta negara-negara di dunia agar mengecam Irak dan mendukung upaya Amerika Serikat untuk mengusir Irak dari Kuwait. Amerika Serikat juga menekan negara-negara Arab untuk mendukung penempatan kekuatan militernya di kawasan Teluk khususnya di Arab Saudi. Upaya Amerika Serikat juga dilakukan dengan mempengaruhi negara-negara yang mempunyai Hak Veto khususnya Uni Soviet dan China agar mendukung upaya Amerika Serikat untuk mengecam tindakan invasi Irak. Semua upaya Amerika Serikat berhasil dengan baik. Namun ketika Amerika Serikat akan menggunakan kekuatan militernya untuk mengusir Irak dari Kuwait, Amerika menghadapi hambatan yaitu perlunya mandat dari

Dewan Keamanan PBB. Tanpa mandat itu Amerika Serikat tidak dapat menggunakan kekuatan militernya. Apabila Amerika Serikat melakukan intervensi militer terhadap Irak tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB, maka Amerika Serikat akan dianggap juga sebagai pelanggar ketentuan dan hukum Internasional. Itulah sebabnya Amerika Serikat melakukan segala upaya untuk mempengaruhi anggota Dewan Keamanan PBB agar mendukung dan menyetujui dikeluarkannya resolusi yang memberikan mandat penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak. Disini menunjukkan bahwa Amerika Serikat memerlukan kerjasama dengan PBB dalam upaya penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait dan hal itulah yang menyebabkan adanya kerjasama PBB-Amerika Serikat.

C. Analisis Kerjasama Amerika Serikat-PBB.

1. Interdependensi Mendorong Kerjasama.

Ketika terjadi invasi Irak terhadap Kuwait, situasi internasional masih diwarnai oleh sistem bipolar dimana Amerika Serikat dan Uni Soviet masih merupakan negara adikuasa yang memiliki hegemoni di bloknya masing-masing. Runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 belum meruntuhkan Uni Soviet pada saat itu, walaupun tanda-tanda kearah itu sudah mulai nampak. Dalam situasi seperti itu Amerika Serikat maupun Uni Soviet akan lebih hati-hati dan melakukan pertimbangan yang matang dalam upaya menyelesaikan sebuah konflik bersenjata. Amerika Serikat tidak akan melakukan intervensi militer terhadap sebuah negara yang melanggar ketentuan internasional, apabila negara itu berada dibawah pengaruh Uni Soviet. Demikian juga Uni Soviet tidak akan melakukan intervensi militer terhadap sebuah negara apabila negara itu dibawah pengaruh Amerika Serikat. Situasi inilah yang terjadi ketika Irak melakukan invasi terhadap Kuwait.

Irak pada era Presiden Saddam Hussein banyak membeli persenjataan dan peralatan militernya dari Uni Soviet dan bahkan ketika perang dengan Iran banyak penasehat militer Uni Soviet berada di Irak. Amerikapun mempunyai hubungan yang baik dengan Irak, karena Irak dipandang sebagai negara yang dapat bekerjasama untuk menghadapi Pemerintah Iran yang radikal dan anti Amerika Serikat. Situasi ini dimanfaatkan oleh Presiden Saddam Hussein untuk

mengambil keuntungan dengan melancarkan invasi terhadap Kuwait. Saddam Hussein memperkirakan bahwa Amerika Serikat tidak akan berani melakukan intervensi militer terhadap Irak, karena Uni Soviet akan membantu Irak melawan Amerika. Demikian juga di forum Dewan Keamanan PBB, keinginan Amerika Serikat untuk memperoleh mandat penggunaan kekuatan militer terhadap Irak pasti akan diveto oleh Uni Soviet. Hal itulah yang memperkuat dorongan Irak untuk melakukan invasi terhadap Kuwait.

Dalam situasi tersebut diatas, Amerika Serikat mengerti betul bahwa Uni Soviet sudah berada diambang keruntuhan, karena perekonomiannya mulai goyah dan membutuhkan bantuan dan dukungan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Ketika terjadi invasi Irak terhadap Kuwait, Uni Soviet tidak mengecamnya dan meminta agar kasus invasi Irak diselesaikan dengan cara-cara damai. Amerika Serikat tetap memperhitungkan kekuatan militer Uni Soviet yang dapat dikerahkan untuk membantu Irak. Dalam menghadapi situasi itu, Amerika Serikat melakukan komunikasi diplomatik dan upaya untuk melakukan pendekatan terhadap Uni Soviet untuk tidak membantu Irak dengan memberikan kompensasi-kompensasi yang dapat disepakati bersama.¹³¹ Upaya Amerika Serikat tersebut berhasil dan Uni Soviet mengeluarkan pernyataan yang mengecam Irak dan meminta Irak segera keluar dari Kuwait. Hal itu dilakukan oleh Uni Soviet setelah mendapat kompensasi dari Amerika Serikat dan pinjaman yang cukup besar dari Arab Saudi.

Perubahan sikap Uni Soviet itu membuat Amerika Serikat lebih percaya diri untuk mengambil tindakan militer terhadap Irak. Namun untuk memenuhi keinginannya itu, Amerika Serikat harus mendapat mandat dari Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB sebagai lembaga tidak dapat mengambil keputusan sendiri, karena keputusan Dewan Keamanan PBB diambil berdasarkan keputusan bersama oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB. Sedangkan anggota Dewan Keamanan PBB terdiri dari Anggota Tetap yang memiliki Hak Veto dan Anggota Tidak Tetap yang hanya memiliki Hak Suara. Dalam hal itu Dewan Keamanan PBB sangat tergantung dari keputusan para anggotanya. Apabila anggotanya setuju untuk mengambil tindakan militer terhadap Irak, maka Dewan Keamanan PBB akan mengeluarkan resolusi yang

¹³¹ Lando, opcit, hal.144

memberikan mandat untuk melakukan tindakan militer. Namun sebaliknya apabila anggota Dewan Keamanan PBB tidak setuju untuk memberikan mandat penggunaan kekuatan militer, maka Dewan Keamanan PBB tidak akan mengeluarkan resolusi tentang pemberian mandat penggunaan kekuatan militer. Untuk itulah diperlukan adanya peranan anggota Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pendekatan, lobi dan diplomasi agar anggota Dewan Keamanan PBB yang lain dapat menyetujui resolusi yang memberikan mandat untuk melakukan tindakan militer terhadap Irak.

Amerika Serikat yang kepentingannya nasionalnya terancam oleh tindakan invasi Irak berupaya dengan segala cara untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Amerika Serikat melakukan diplomasi untuk meyakinkan dunia internasional bahwa Irak telah melanggar ketentuan internasional dan harus dikecam bersama. Amerika Serikat meminta agar negara-negara Arab untuk mengecam Irak dan meminta Irak untuk segera mundur dari Kuwait. Amerika Serikat meminta kepada Arab Saudi untuk mengizinkan pasukannya agar dapat ditempatkan di negara itu dalam rangka persiapan untuk melakukan tindakan militer terhadap Irak. Kepada negara-negara sekutunya pun Amerika Serikat meminta dukungan untuk membangun Pasukan Koalisi pimpinan Amerika Serikat dalam upaya mengusir Irak dari Kuwait. Upaya diplomasi Amerika Serikat di luar forum PBB dapat berjalan lancar dan Amerika Serikat terus membangun kekuatan militer Koalisi di Kawasan Teluk. Upaya Amerika Serikat itu diimbangi dengan upaya diplomasi di forum Dewan Keamanan PBB.

Untuk melakukan intervensi militer terhadap Irak, Amerika Serikat tidak dapat berbuat sendiri tanpa dukungan dan mandat dari Dewan Keamanan PBB, karena sesuai dengan Bab VII Piagam PBB menyatakan bahwa: Dewan Keamanan akan menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi dan akan memberikan rekomendasi, atau memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan, memelihara atau mengembalikan keamanan dan perdamaian internasional. Hal itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat sebagai anggota PBB tidak dapat bertindak sendiri tanpa adanya mandat dari Dewan Keamanan PBB. Untuk memperoleh mandat itulah Amerika Serikat melakukan diplomasi, pendekatan, penekanan

dan bahkan penyogokan terhadap anggota Dewan Keamanan PBB yang lain,¹³² agar anggota Dewan Keamanan PBB sepakat untuk mengeluarkan resolusi yang memberikan mandat menggunakan kekuatan militer terhadap Irak. Kepada negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB yang mendukung, Amerika Serikat memberikan kompensasi-kompensasi yang saling menguntungkan. Uni Soviet dan China yang semula menentang, setelah mendapat kompensasi dari Amerika Serikat menjadi berubah sikap. Uni Soviet mendukung untuk dikeluarkannya resolusi 678 dan China abstain. Negara-negara lain anggota Dewan Keamanan PBB yang mendapat jaminan dan kompensasi dari Amerika Serikat dan sekutunya memberikan dukungan penuh untuk dikeluarkannya Resolusi 678. Sedangkan kepada Kuba dan Yaman, Amerika Serikat tidak berhasil dan tetap menolak resolusi itu. Namun karena kedua negara itu tidak memiliki Hak Veto, maka resolusi tetap dapat dikeluarkan, karena disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB dan tidak ada yang menggunakan Hak Veto. Hal itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat harus bekerjasama Dewan Keamanan PBB agar dapat mengusir Irak dari Kuwait.

Setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 678, maka PBB juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan negara-negara anggotanya. Disamping itu PBB juga tidak mempunyai pasukan militer yang berada dibawah komandonya dan tidak memiliki dana yang sangat besar yang dibutuhkan untuk membiayai seluruh operasi militer menghadapi tentara Irak yang besar dan kuat. Disinilah PBB harus bekerjasama dengan Amerika Serikat, karena hanya Amerika Serikatlah yang dapat manggalang dan menyediakan pasukan militer yang besar dan kuat serta dana besar untuk membiayai operasi militer yang besar untuk mengusir Irak dari Kuwait. Dengan kekuatan dan kemampuan Amerika Serikat membangun Pasukan Koalisi dan menggalang dana, maka Operasi Badai Gurun dapat dilaksanakan. Operasi Badai Gurun inilah yang dapat mengusir Irak dari Kuwait, mengembalikan kedaulatan Kuwait dan memulihkan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah.

Teori interdependensi menyatakan bahwa interdependensi adalah sebuah situasi saling ketergantungan dimana kehilangan otonomi menimbulkan efek timbal balik yang berharga, sehingga interdependensi tidak hanya mengacu

¹³² Lando, opcit, hal.149

kepada situasi yang saling menguntungkan. Dalam kasus penyelesaian invasi Irak terhadap Kuwait, PBB tidak dapat melakukan tindakan sendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut tanpa dukungan Amerika Serikat. Demikian juga Amerika Serikat tidak dapat bertindak sendiri tanpa dukungan PBB, sehingga terjadilah interdependensi antara PBB dan Amerika Serikat. Akibat dari interdependensi tersebut, baik PBB maupun Amerika Serikat kehilangan otonominya untuk bertindak sendiri, mereka harus bekerjasama sesuai dengan tujuan yang dikehendaki bersama. Interdependensi PBB dan Amerika Serikat itu menimbulkan dampak saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini kepentingan nasional Amerika Serikat dapat dipelihara dan PBB dapat memulihkan keamanan dan perdamaian sesuai amanat Piagam PBB.

Keohane dan Nye mendefinisikan interdependensi berdasarkan kepada tiga karakteristik, yaitu : 1) aktor adalah negara dan aktor non-negara dengan berbagai saluran komunikasi, antar negara, lintas negara dan transnasional; 2) agenda hubungan antar negara terdiri dari berbagai isu yang tidak diatur oleh sebuah hierarki yang jelas dan konsisten, artinya berbagai isu dapat muncul tanpa hierarki; 3) kekuatan militer memainkan peranan yang relatif kecil dalam hubungan internasional. Sebagai hasil dari ketiga karakteristik tersebut proses pembedaan politik menimbulkan perubahan sumber kekuatan menjadi kekuatan sebagai pengendali hasil dari keterkaitan strategis, penyusunan agenda, hubungan transnasional dan antar negara.¹³³ Mengacu kepada teori interdependensi yang diajukan oleh Keohane dan Nye, maka analisis penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1. Aktor dominan yang melakukan upaya penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait adalah negara dan non-negara. Dalam hal ini PBB sebagai organisasi internasional dan Amerika Serikat sebagai sebuah negara adikuasa. PBB dengan berbagai saluran komunikasi antar negara, lintas negara dan transnasional mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait melalui kerangka kerjanya, yaitu dengan melakukan diplomasi internasional dan mengeluarkan resolusi-resolusi Dewan Keamanan

¹³³ Keohane and Nye, *opcit*, hal. 12

PBB. Dengan resolusi-resolusinya, Dewan Keamanan PBB dapat menghimpun kekuatan internasional untuk memaksa sebuah negara agar mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah dikeluarkan. Di lain pihak Amerika Serikat sebagai negara adikuasa yang memiliki saluran komunikasi antar negara, lintas negara dan transnasional mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait melalui kemampuan dan kekuatan ekonomi dan militernya. Namun kedua aktor itu tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, karena ada ketentuan dan peraturan internasional yang harus ditaati oleh kedua belah pihak, yaitu Piagam PBB. Hal itulah yang menimbulkan adanya interdependensi antara PBB dan Amerika Serikat yang mendorong terjadinya kerjasama.

1.2. Hubungan antara Amerika Serikat dengan PBB pada dasarnya adalah hubungan antara organisasi internasional terhadap negara anggotanya. Oleh karena itu agenda-agenda internasional Amerika Serikat belum tentu sama dengan agenda-agenda PBB. Hubungan antara PBB dan Amerika Serikat mencakup semua agenda yang membahas berbagai isu internasional termasuk isu keamanan dan perdamaian dunia. Khusus menghadapi kasus invasi Irak terhadap Kuwait, Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB mempunyai agenda yang sama yaitu menyelesaikan kasus pelanggaran ketentuan internasional tentang keamanan dan perdamaian internasional yang dilakukan oleh Irak. Untuk mencapai kesepakatan dan kesamaan tindakan dalam menyelesaikan kasus tersebut, Amerika Serikat tergantung kepada dukungan Dewan Keamanan PBB dan Dewan Keamanan PBB tergantung dari dukungan Amerika Serikat. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya interdependensi antara PBB dan Amerika Serikat dan interdependensi itu mendorong adanya kerjasama PBB-Amerika Serikat dalam upaya menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait.

1.3. Karakteristik yang ketiga adalah kekuatan militer memainkan peranan yang relatif kecil dalam hubungan internasional. Dalam hal ini

Amerika Serikat tidak menggunakan kekuatan militernya untuk menekan negara-negara lain anggota PBB agar mendukung upaya Amerika Serikat menghadapi Irak. Amerika Serikat lebih mengutamakan cara-cara diplomasi, pendekatan dan penyogokan untuk meminta dukungan internasional. Demikian juga PBB tidak sertamerta mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait. PBB lebih mengutamakan cara-cara damai untuk menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Penggunaan kekuatan militer dalam hubungan antara PBB dan Amerika Serikat tidak dilakukan dan kedua belah pihak lebih mengutamakan cara-cara damai dalam bekerjasama. Sedangkan penggunaan militer dalam menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait diambil setelah semua upaya damai dan diplomasi tidak berjalan dan Irak tidak mau mundur dari Kuwait. Disini berarti bahwa penggunaan kekuatan militer merupakan upaya terakhir apabila diplomasi dan cara-cara damai mengalami kegagalan. Dalam hal ini interdependensi tidak selalu mengecilkan arti penggunaan kekuatan militer, namun penggunaan kekuatan militer masih sangat diperlukan dalam hubungan internasional ketika cara-cara damai dalam resolusi konflik tidak dapat berjalan sesuai harapan bersama.

1.4. Kekuatan dari sebuah interdependensi ditentukan oleh adanya kerawanan dan sensitifitas dari para aktor yang terlibat. Keohane dan Nye menyatakan bahwa sensitifitas berkaitan dengan seberapa besar sebuah negara dipengaruhi oleh kebijakan negara lain sebelum bereaksi atas terjadinya perubahan, dengan asumsi bahwa kerangka kerjasama tidak mengalami perubahan. Sedangkan kerawanan adalah sebagaimana baik dan cepatnya sebuah negara dapat bereaksi atas terjadinya perubahan kebijakan negara lain, dengan asumsi kerangka kerjasama telah berubah. Keohane dan Nye menyimpulkan bahwa dilihat dari sudut pandang penyediaan sumber kekuatan (*providing power resources*) bagi aktor, maka sensitifitas tidak sepenting kerawanan dalam interdependensi.¹³⁴ Dalam kasus penyelesaian invasi Irak terhadap

¹³⁴ Keohane and Nye, *opcit*, hal. 12

Kuwait, PBB cukup sensitif dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh Irak, karena tindakan invasi Irak merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan internasional yang harus ditegakan oleh PBB. Dengan sensitifitasnya itulah PBB sangat mendukung upaya Amerika Serikat untuk mengusir Irak dari Kuwait. Posisi PBB juga cukup rawan dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan Irak, karena hal itu menyangkut eksistensi, kredibilitas dan martabat PBB sebagai penanggungjawab keamanan dan perdamaian internasional. Di lain pihak Amerika Serikat cukup sensitif namun sangat rawan atas tindakan Irak, karena tindakan Irak itu merupakan ancaman langsung terhadap kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sensitifitas PBB dan Amerika Serikat mengakibatkan kedua belah pihak mengerahkan segala kekuatan dan kekuasaannya masing-masing untuk mengusir Irak dari Kuwait. Demikian juga dengan adanya tingkat kerawanan yang dihadapi PBB maupun Amerika Serikat mendorong PBB maupun Amerika Serikat untuk menyiapkan dan mengerahkan kekuatan dan kekuatannya agar dapat menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait secepatnya. Sensitifitas dan kerawanan PBB dan Amerika Serikat itulah yang menyebabkan terjadinya interdependensi antara kedua belah pihak. Interdependensi itulah yang mendorong adanya kerjasama PBB-Amerika Serikat dalam upaya mengusir Irak dari Kuwait dan memulihkan keamanan dan perdamaian Timur Tengah.

2. Keamanan Kolektif Mendorong Kerjasama.

Dalam membahas kerjasama PBB-Amerika Serikat, teori keamanan kolektif juga dijadikan pisau analisis dalam kajian ini. Konsep dasar keamanan kolektif adalah melembagakan kerjasama yang telah terjalin sehingga seluruh komunitas internasional sepakat untuk menentang terjadinya agresi oleh sesama negara anggota. Tidak ada satu negarapun yang akan membantu sebuah negara anggota yang akan melakukan agresi terhadap negara anggota lainnya, sehingga diharapkan keinginan untuk melaksanakan agresi dapat dicegah. Konsep dasar keamanan kolektif ini dilaksanakan oleh PBB sebagai perwujudan lembaga internasional yang bertujuan menciptakan keamanan dan perdamaian

internasional. PBB sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB sangat menentang adanya agresi oleh sebuah negara terhadap negara lainnya. Agresi harus dicegah dan apabila sudah terjadi, maka hukum internasional harus ditegakan. Penegakan hukum internasional harus dilakukan dengan cara-cara damai, namun apabila dengan cara damai tidak juga dipatuhi, maka penggunaan kekuatan militer dapat dilakukan. Invasi Irak terhadap Kuwait merupakan pelanggaran terhadap keamanan kolektif yang telah disepakati bersama.

Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa kondisi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan keamanan kolektif adalah” 1) semua negara anggota harus mengakui *status quo* dan menghentikan penggunaan kekuatan militer untuk tujuan lain selain untuk pertahanan negaranya sendiri; 2) semua negara anggota harus menyetujui untuk menentang setiap agresi yang terjadi; 3) semua negara terutama negara-negara besar harus memiliki komitmen yang kuat bahwa penggunaan kekuatan militer dan keuangannya tidak digunakan untuk membantu, mendorong atau melakukan agresi walaupun hal itu berkaitan langsung terhadap kepentingan nasionalnya; dan 4) semua negara harus secara aktif mencegah tindakan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama.¹³⁵

Masyarakat internasional dan seluruh negara-negara di dunia menginginkan situasi dunia yang aman dan damai, sehingga mereka dapat berinteraksi yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Kondisi yang diinginkan oleh seluruh anggota PBB itu telah dilanggar oleh Irak. Irak telah melanggar *statusquo* dan menggunakan kekuatannya untuk melancarkan invasi terhadap negara tetangganya. Kekuatan militer Irak yang seharusnya digunakan hanya untuk pertahanan negaranya, tapi digunakan untuk kepentingan lain, yaitu melakukan invasi militer terhadap negara lain. Hal itulah yang membuat mayoritas negara-negara anggota PBB mengecam keras tindakan Irak dan meminta agar Irak segera mundur dari Kuwait tanpa syarat. Permintaan dunia internasional itu sesuai dengan konsep dasar keamanan kolektif seperti yang tercantum dalam Piagam PBB yang harus dipatuhi oleh semua anggota PBB. Kecaman dan

¹³⁵ Stormberg, opcit, hal. 3

tuntutan dunia internasional termasuk PBB merupakan perwujudan kesadaran semua anggota PBB akan pentingnya keamanan kolektif.

Keamanan kolektif menghendaki semua negara anggota harus menyetujui untuk menentang setiap agresi yang terjadi. Dalam kasus invasi Irak terhadap Kuwait, hanya Yordania, Yaman dan Kuba sebagai anggota PBB yang mendukung tindakan Irak. Selain itu semua negara anggota PBB yang disponsori oleh Dewan Keamanan PBB dan Amerika Serikat menentang dan mengecam tindakan Irak itu. Fakta lain yang memperlihatkan adanya kecaman terhadap agresi Irak adalah banyaknya negara yang mendukung dan bergabung dalam Pasukan Koalisi pimpinan Amerika Serikat. Negara-negara yang mendukung Pasukan Koalisi tidak hanya mendukung dengan mengirimkan kekuatan militernya, namun juga banyak yang memberikan kontribusi dalam bentuk dukungan dana dan dukungan diplomasi internasional. Hal itulah yang menunjukkan bahwa keamanan kolektif dapat berjalan sesuai dengan harapan semua anggotanya.

Semua negara terutama negara-negara besar harus memiliki komitmen penggunaan kekuatan militer dan keuangannya tidak digunakan untuk membantu, mendorong atau melakukan agresi walaupun hal itu berkaitan langsung terhadap kepentingan nasionalnya. Dalam hubungan ini negara-negara besar anggota PBB terutama yang memiliki Hak Veto di Dewan Keamanan PBB semuanya sepakat bahwa tindakan Irak adalah pelanggaran terhadap keamanan kolektif dan peraturan internasional. Walaupun pada awalnya Uni Soviet dan China tidak mendukung penggunaan kekuatan militer untuk mengusir Irak dari Kuwait, namun kemudian kedua negara itu sepakat dan meloloskan Resolusi 678. Disini menunjukkan bahwa negara-negara besar memiliki komitmen untuk tidak mendukung atau membantu Irak dalam melakukan agresinya. Bagi Uni Soviet dan China sebenarnya kedua negara itu memiliki hubungan yang kuat di bidang ekonomi maupun militer, sehingga akan sangat wajar apabila kedua negara itu mendukung dan membantu Irak. Kedua negara itu mempunyai kepentingan untuk membantu Irak, namun ketika Dewan Keamanan PBB akan mengeluarkan resolusi 678, Uni Soviet mendukung dan China abstain. Fakta itu menunjukkan bahwa negara-negara besar memiliki komitmen terhadap pelaksanaan keamanan kolektif, walaupun masih perlu dipengaruhi oleh pihak atau negara yang lebih kuat.

Untuk terlaksananya keamanan kolektif, semua negara harus secara aktif mencegah tindakan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Ketika hubungan Irak dengan Kuwait mulai memanas, negara-negara di kawasan Timur Tengah berupaya agar Irak tidak menggunakan kekuatan militernya terhadap Kuwait. Hal itu dapat dilihat dari diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Mesir Housni Mubarak, Raja Fahd dari Arab Saudi, Raja Hussein dari Yordania dan Pemimpin Palestina Yasser Arafat. Kepada kepala-kepala negara Arab, Saddam Hussein menyatakan tidak akan menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan konflik dengan Kuwait.¹³⁶ Demikian juga kepada Dubes Amerika Serikat April Glaspie, Saddam Hussein memberikan isyarat yang sama. Untuk mencegah terjadinya konflik bersenjata antara Irak dan Kuwait yang sangat tidak seimbang, upaya yang dilakukan oleh para pemimpin Arab sebenarnya sudah cukup baik dalam upaya memelihara dan menjaga keamanan kolektif. Namun karena kekerasan hati Saddam Hussein dan keangkuhan Penguasa Kuwait, maka invasi Irak terhadap Kuwait tidak dapat dihindari.

Setelah terjadinya invasi Irak terhadap Kuwait, Amerika Serikat sebagai negara adikuasa yang sudah menempatkan kekuatan militernya di Arab Saudi dapat saja melakukan intervensi militer untuk mengusir Irak dari Kuwait tanpa harus meminta persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat justru meminta dan mendesak agar Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang memberikan mandat penggunaan kekuatan militer dalam mengusir Irak dari Kuwait. Tindakan Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat berupaya untuk tidak melakukan pelanggaran peraturan dan ketentuan internasional yang telah disepakati bersama. Dengan dikeluarkannya Resolusi 678, Amerika Serikat dengan Pasukan Koalisinya dapat melancarkan Operasi Badai Gurun yang dapat mengusir Irak dari Kuwait dan memulihkan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah. Disini terlihat bahwa PBB dan Amerika Serikat yang didukung oleh negara-negara anggota PBB melaksanakan tindakan kolektif untuk memulihkan keamanan dan perdamaian internasional. Penjelasan diatas juga menunjukkan perlunya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat pada forum

¹³⁶ Lando, *opcit*, hal.122

Dewan Keamanan PBB dan mengimplementasikan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dalam rangka memelihara keamanan kolektif.

3. Kolaborasi Mendorong Kerjasama.

Seperti dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa PBB sebagai penanggungjawab keamanan dan perdamaian internasional mengeluarkan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dan melakukan upaya penyelesaian sebuah konflik internasional sesuai dengan kemampuannya. PBB sebagai organisasi internasional tidak mempunyai alat penegak hukum internasional yang dimilikinya sendiri. Apabila PBB ingin melakukan intervensi militer terhadap sebuah negara yang nyata-nyata melanggar Piagam PBB, PBB harus minta kontribusi kekuatan militer dari negara anggotanya. Apabila tidak ada anggota PBB yang mau dan mampu memberikan kontribusi, maka PBB tidak dapat berbuat apa-apa. Disinilah perlunya kerjasama antara PBB dengan negara-negara anggotanya yang memiliki kemampuan dan kekuatan militer maupun ekonomi untuk melakukan tindakan sesuai dengan resolusi yang dikeluarkan.

Invasi Irak terhadap Kuwait, disamping telah melanggar Piagam PBB dan membahayakan keamanan dan perdamaian internasional, juga membahayakan kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah. Oleh karena itu baik PBB maupun Amerika Serikat mempunyai tujuan yang sama untuk mengusir Irak dari Kuwait sesuai dengan kepentingannya masing-masing. PBB ingin mengusir Irak dari Kuwait, karena Irak telah melanggar Piagam PBB dan tindakannya itu membahayakan keamanan dan perdamaian internasional. Demikian juga Amerika Serikat ingin mengusir Irak dari Kuwait karena Irak telah mengancam kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Irak telah mengancam cadangan minyak strategis Amerika Serikat di Timur Tengah, mengancam eksistensi negara Israel, membahayakan hegemoni Amerika Serikat dan mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian di Timur Tengah.

Karena dua kepentingan dari dua insitusi telah terancam yaitu kepentingan PBB dan Amerika Serikat oleh adanya invasi Irak terhadap Kuwait, maka ada dua pilihan bagi dua institusi itu. Yang pertama mereka akan bertindak sendiri-sendiri tanpa saling mendukung, yang kedua mereka akan bekerjasama untuk melakukan tindakan bersama. Untuk melihat apa yang dilakukan PBB dan

Amerika Serikat terhadap kasus invasi Irak terhadap Kuwait, teori kolaborasi digunakan sebagai pisau analisis untuk membahas tindakan PBB dan Amerika Serikat itu. Kolaborasi mempunyai beberapa elemen yang terlihat dalam setiap kegiatan kolaborasi yang dilakukan, yaitu domain kolaborasi, partisipan kolaborasi, media kolaborasi, insentif kolaborasi, kontribusi kolaborasi dan hasil kolaborasi. Di dalam proses kolaborasi terdapat tiga aspek utama yang memerlukan perhatian, yaitu : prasyarat agar kolaborasi dapat dilaksanakan, proses kolaborasi dan hasil kolaborasi.

Dalam sebuah kolaborasi, domain kolaborasi harus menjadi pertimbangan utama. Kejelasan domain yang disepakati akan menentukan arah kolaborasi yang akan dilakukan. Dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait, domain yang dapat menciptakan terjadinya kolaborasi antara PBB dan Amerika Serikat adalah bidang keamanan dan perdamaian. PBB menghendaki pulihnya keamanan dan perdamaian kawasan Timur Tengah yang terancam akibat invasi Irak terhadap Kuwait. Demikian juga Amerika Serikat menginginkan pulihnya keamanan dan perdamaian Timur Tengah agar kepentingan nasionalnya di Timur Tengah dapat terpelihara dan aman. Domain yang sama itulah yang dapat mendorong PBB maupun Amerika Serikat untuk melakukan kolaborasi. Dalam pelaksanaannya Amerika Serikat cenderung memanfaatkan Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Demikian juga PBB memanfaatkan kekuatan militer dan ekonomi Amerika Serikat untuk mengusir Irak dari Kuwait dan memulihkan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah. Dengan adanya saling memanfaatkan itulah yang mendorong kerjasama PBB-Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait.

Dalam hal partisipan, dalam hubungan ini prasyarat terjadinya kolaborasi adalah kedudukan dan posisi yang seimbang antara mereka yang berkolaborasi, agar dalam pelaksanaan kolaborasi tidak ada pihak yang lebih dominan. PBB memiliki posisi dan kedudukan sebagai organisasi internasional yang bertanggungjawab atas keamanan dan perdamaian internasional dan bertugas untuk mencegah agresi dan melakukan penegakan hukum internasional bila terjadi agresi oleh sebuah negara. Sedangkan Amerika Serikat adalah anggota PBB dan anggota Tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki Hak Veto. Posisi dan kedudukan Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB sangat kuat, karena

apapun rancangan keputusan Dewan Keamanan PBB dapat dibatalkan oleh Amerika Serikat dengan menggunakan Hak Vetonya. Dalam hal ini terlihat bahwa PBB sangat membutuhkan dukungan Amerika Serikat agar dapat mengeluarkan resolusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Demikian juga Amerika Serikat tidak dapat berbuat sendiri untuk mengusir Irak dari Kuwait dan sangat membutuhkan dukungan Dewan Keamanan PBB untuk mendapatkan mandat penggunaan kekuatan militernya untuk mengusir Irak. Hal itulah yang juga mendorong adanya kolaborasi antara PBB dan Amerika Serikat. Kolaborasi yang terbangun itu mengakibatkan adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait.

Kolaborasi yang dilakukan memerlukan media kolaborasi. Media kolaborasi dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait adalah kawasan Timur Tengah yang dapat dijadikan medan operasi bagi Pasukan Koalisi pimpinan Amerika Serikat. Karena kejelasan media kolaborasi menentukan tingkat keberhasilan sebuah kolaborasi. Itulah sebabnya baik PBB maupun Amerika Serikat dapat berkolaborasi, karena media kolaborasinya sama, yaitu Kawasan Timur Tengah, sebuah kawasan dimana terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dan hukum internasional yang dilakukan oleh Irak. Agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya insentif kolaborasi. Insentif kolaborasi ini berkaitan dengan sesuatu yang secara eksplisit ataupun implisit tentang motif, tujuan bersama dan keuntungan yang akan diperoleh oleh partisipan. Dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait, isu tentang motif, tujuan dan keuntungan yang akan diperoleh oleh PBB maupun Amerika Serikat sangat jelas. PBB mempunyai motif dan tujuan untuk memulihkan keamanan dan perdamaian internasional dan khususnya di Timur Tengah, kembalinya kekuasaan dan kedaulatan salah satu anggota PBB yaitu Kuwait. Sedangkan keuntungan yang dicapai oleh PBB adalah kredibilitas, eksistensi dan martabat PBB dapat dipertahankan dan lebih meningkat lagi. Demikian juga Amerika Serikat mempunyai motif dan tujuan untuk memulihkan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah dan menjaga hegemoninya di kawasan Timur Tengah. Keuntungan yang dicapai oleh Amerika Serikat adalah terpelihara dan terjaganya kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal itulah yang dapat menimbulkan terjadinya kolaborasi antara PBB dan Amerika Serikat dan kolaborasi itu mendorong terjadinya

kerjasama antara PBB-Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait.

Hal yang juga sangat penting dalam sebuah kolaborasi adalah kontribusi kolaborasi oleh para partisipannya. Agar kolaborasi dapat dilaksanakan, maka kontribusi semua pihak harus seimbang. Dalam hal penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait, PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi itu dapat tidak terlaksana apabila tidak ada anggota PBB yang melaksanakannya. Di lain pihak Amerika Serikat memiliki kekuatan militer dan ekonomi untuk melakukan penegakan hukum internasional, namun Amerika Serikat tidak memiliki mandat untuk melakukan hal tersebut. Dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait, PBB dan Amerika Serikat tidak dapat berjalan sendiri-sendiri dengan pertimbangannya masing-masing. Oleh karena itu tidak pilihan lain bagi kedua aktor itu kecuali melakukan kolaborasi. Dengan adanya kolaborasi itu, maka terjadilah kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat.

Hasil yang ingin dicapai dalam sebuah kolaborasi merupakan sesuatu yang selalu dipertimbangkan oleh partisipan. Penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait bagi PBB harus menghasilkan sebuah solusi, yaitu suatu situasi dan kondisi keamanan dan perdamaian internasional yang dapat dipulihkan. Demikian juga bagi Amerika Serikat, hasil yang ingin dicapai adalah terciptanya kembali keamanan dan perdamaian agar kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah dapat terjamin. Dengan kesamaan pandangan tentang hasil yang akan dicapai, maka terjadilah kolaborasi antara PBB dan Amerika Serikat dan kolaborasi itu menimbulkan kerjasama. Hasil dari kolaborasi dan kerjasama itulah yang menghasilkan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk Resolusi 678 yang memberikan mandat kepada Amerika Serikat dan Pasukan Koalisinya untuk melancarkan Operasi Badai Gurun yang dapat mengusir Irak dari Kuwait, mengembalikan kekuasaan dan kedaulatan Pemerintahan Kuwait dan memulihkan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah.

Analisis diatas menunjukkan terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat yang disebabkan oleh adanya pandangan yang sama tentang keamanan kolektif, adanya interdependensi dan perlunya kolaborasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Disamping itu keterkaitan PBB dalam penyelesaian kasus invasi Irak memerlukan dukungan Amerika Serikat dan hal ini

menyebabkan ketergantungan dan kerjasama dengan Amerika Serikat. Demikian juga keterkaitan Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait memerlukan dukungan PBB dan menyebabkan ketergantungan Amerika Serikat dan perlunya kerjasama dengan PBB. Hal itulah yang juga menyebabkan terjadinya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan kerangka teori interdependensi, teori keamanan kolektif dan teori kolaborasi menunjukkan bahwa dalam upaya penyelesaian kasus invasi Irak terhadap Kuwait terjadi adanya kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat. Kerjasama antara PBB dan Amerika Serikat itu terjadi karena adanya kesadaran akan keamanan kolektif, terjadinya interdependensi dan perlunya kolaborasi antara PBB dan Amerika Serikat dalam upaya menyelesaikan kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Hasil akhir dari kerjasama PBB-Amerika Serikat itu adalah tindakan keamanan kolektif pimpinan Amerika Serikat dalam bentuk Operasi Badai Gurun yang dapat mengusir Irak dari Kuwait dan mengembalikan Pemerintahan Kuwait serta memulihkan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah.